

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik atau dikenal *good governance* ialah wujud keberhasilan dalam melaksanakan tugas pembangunan negara sesuai dengan manfaa yang telah ditata. Pemerintahan yang baik diperlukan di setiap negara, seiring dengan perekonomian dan perkembangan teknologi saat ini. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, otoritas publik harus mempunyai pilihan untuk mengawasi aset-aset yang ada, salah satu aset yang paling signifikan adalah keuangan. Pengamatan dapat dilaksanaka dari semakin besarnya minat masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan perekonomian. Mengingat PP No. 8 Tahun 2006 memuat Perincian Moneter dan Organisasi Pemerintahan mengartikan laporan keuangan ialah suatu bentuk tanggungjawab penyelenggaraan moneter negara atau wilayah pada suatu periode. Laporan keuangan juga harus memenuhi sejumlah kriteria yang memadai, antara lain dapat dipercaya, dapat dinilai, dapat diperbandingkan, dapat dipahami, dan relevan sesuai ketentuan. Beberapa pihak yang berkepentingan akan mendasarkan keputusannya pada laporan keuangan yang dibentu pemerintah daerah. Data yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah provinsi harus bernilai dan sesuai kebutuhan. Dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan, pemerintah daerah wajib memperhatikan dengan cermat data-data dalam laporan keuangan.

Pemerintah daerah mempunyai SAKD , sistem ini berupa proses catatan transaksi hingga laporannya (Pasal 1. Pemendagri 13/2006). Sebagai bentuk

pertanggungjawaban APBD, SAKD memberi catatan lengkap memuat petanggungjawaban pengelolaan dana yang akan dipakai menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (Pasal 5, PP 58/2008). SAKD yang diindikasikan dengan pengaturannya akan menciptakan laporan berkualitas (Defitri, 2018). Eksekusi suatu kerangka kerja yang baik tidak dapat dicapai secara efektif jika orang yang menjalankannya tak menjunjungnya (Pujanira dan Taman, 2017). Permasalahan kopensasi SDM cukup menyulitkan setiap perwakilan pemerintahan karena mengingat keanehan yang dialami masih terdapat kesenjangan antara keterampilan dan kebutuhan pekerjaan utama dengan keterampilan yang dimilikinya, sehingga para pekerja perlu belajar mengenai administrasi keuangan. (Saifuddin, 2017).

Permasalahan terkait dengan kualitasn laporan keuangan juga terjadi pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Adanya fluktuasi kualitas laporan keuangan tersaji pada data grafik berikut.



Gambar 1.1

Grafik Laporan Fisik Keuangan Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Buleleng

Sumber : Laporan Fisik Keuangan Dinas PUTR

Dari Grafik dapat dianalisis bahwa kualitas laporan keuangannya dari tahun 2018-2022 cenderung berflutuasi cukup substansial di setiap tahunnya. Namun apabila dibandingkan dengan dinas lainnya capaian laporan fisik dan keuangan

pada Dinas PUTR masih cukup rendah. Berikut merupakan data capaian kinerja dari dua dinas lainnya yang berada di kabupaten Buleleng tersaji pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Laporan Fisik & Keuangan Dinas Lainnya di Kabupaten Buleleng

Nama Dinas	Laporan Fisik & Keuangan		Nama Dinas	Laporan Fisik & Keuangan		Nama Dinas	Laporan Fisik & Keuangan	
	2018	2019		2018	2019		2018	2019
BPKPD Kabupaten Buleleng	2018	92,23	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	2018	89,02	Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng	2018	89,72
	2019	93,97		2019	95,04		2019	96,57
	2020	94,92		2020	82,64		2020	98,82
	2021	95,44		2021	94,18		2021	97,83
	2022	98,08		2022	98,65		2022	97,77

Sumber : Dinas PUTR, 2023

Pada tahun 2022 dinas PUTR hanya mencapai persentase 86,43% pada laporan fisik dan keuangan sementara pada BPKPD kabupaten Buleleng mencapai 98,85%, Dinas kesehatan kabupaten Buleleng mencapai 98,65% dan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mencapai 97,77%. Berdasarkan data tersebut pencapaian laporan fisik dan keuangan Dinas PUTR pada tahun 2022 masih tergolong rendah. Data yang menyajikan pencapaian laporan fisik dan keuangan pada tahun 2022 menunjukkan perbedaan signifikan antara Dinas PUTR Kabupaten Buleleng dengan dinas-dinas lain seperti BPKPD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan tersebut. Perbedaan tersebut memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pencapaian Dinas

PUTR. Dinas-dinas lain seperti BPKPD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian menunjukkan peningkatan konsistensi dalam pencapaian kinerja dari tahun ke tahun, mencapai tingkat pencapaian yang tinggi pada tahun 2022. Sebaliknya, Dinas PUTR masih menghadapi kendala yang menghambat peningkatan konsistensi pencapaian kinerja. Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam pencapaian kinerja dari tahun 2018 hingga 2022. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam manajemen laporan fisik dan keuangan pada kedua dinas tersebut. Hal tersebut menjadi dasar peneliti memilih Dinas PUTR sebagai subjek penelitian untuk mengkaji faktor yang diduga dapat memberi pengaruh kualitas laporan keuangan pada Dinas PUTR.

Laporan fisik dan keuangan yang rendah dapat mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum, memiliki hak untuk mengetahui dan memahami bagaimana dana publik digunakan, dan rendahnya capaian dapat menciptakan ketidakjelasan. Capaian laporan fisik dan keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja suatu organisasi atau instansi. Rendahnya pencapaian dapat mempengaruhi penilaian kinerja organisasi oleh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemangku kepentingan lokal, atau lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Rendahnya capaian laporan fisik dan keuangan pada Dinas PUTR dapat memberi dampak berlawanan atas kualitas laporan keuangan. Ketidakkuratan informasi yang mungkin muncul akibat rendahnya capaian tersebut dapat membangun laporan moneter yang tak akurat dan kurang tepat waktu. Selain itu, keterlambatan dalam penyusunan laporan fisik dan keuangan

dapat menghambat analisis dan evaluasi yang mendalam terhadap kinerja keuangan. Rendahnya capaian juga dapat menunjukkan rendahnya efektivitas pengendalian internal, meningkatkan risiko kesalahan atau kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Dampaknya dapat mencakup ketidaksesuaian dengan standard akuntansi yang berlaku dan kesulitan dalam pengambilan keputusan yang efektif. Seiring dengan itu, ketidakjelasan penggunaan dana dan kurangnya transparansi dapat merugikan kepercayaan pemangku kepentingan, sementara ketidakpastian terkait kinerja keuangan dapat merugikan perencanaan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbaikan dalam capaian laporan fisik dan keuangan menjadi esensial.

Kualitas LKPD diberi pengaruh berbagai faktor, misalnya kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan sistem akuntansi keuangan. Hubungan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem akuntansi keuangan dapat memberi dampak substansial atas kualitas LKPD. Untuk memahami dan mengelolanya dapat meningkatkan kualitas LKPD dan juga memenuhi standard akuntansi yang berlaku. SDM ialah titik pendukung yang sangat vital sekaligus pendorong utama asosiasi dalam upayanya memahami tujuan visi dan misinya (Sudarmanto, 2009). Kerangka kerja terbaik apa pun tidak akan ada habisnya, jika tidak didukung oleh kualitas aset manusia yang memadai, terkhususnya sifat individual SDM yang terbagi atas potensi pendidikan, pengalaman dan persiapan serta diperkirakan berdasarkan informasi, kemampuan dan perilaku SDM yang bersangkutan (Sudiarianti dkk, 2015).

Pada dinas PUTR komposisi pegawai dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni dapat dikatakan rendah. Berdasarkan data yang diperoleh sebagian besar

pegawai merupakan lulusan SMA bahkan ada yang lulusan SD. Berikut merupakan data persentase latar belakang pendidikan pegawai Dinas PUTR tersaji pada Tabel 1.2.

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
S2	7	2,53%
S1	79	28,52%
D1-D4	12	4,33%
SMA/SMK	151	54,52%
SD-SMP	28	10,10%
Jumlah	277	100%

Sumber : Data Rekapitulasi SDM Dinas PUTR Kabupaten Buleleng

Berdasar data pada Tabel 1.2 persentase pendidikan terakhir ialah paling besar pada tingkat SMA/SMK yakni sebanyak 54,52%. Tingkat pendidikan memiliki peran pada pondasi kualitas SDM. Tingkat pendidikan yang tidak sesuai spesifikasi atau rendah dari individu yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat memberi dampak berlawanan terhadap kualitas laporan keuangan tersebut. SDM ialah faktor krusial dalam terciptanya LKPD yang berkualitas, Patonengan (2021). Kejayaan perusahaan tak hanya dikirakan dari SDM tetapi kompetensi. Kompetensi erat berkaitannya dengan SDM yakni tersedianya aparatur yang dapat dipercaya dan membentuk LKPD yang berkualitas. Ketidakmampuan memahami proses penyusunan laporan keuangan ialah bentuk kegagalan SDM (Rusvianto, dkk, 2018).

Dampaknya terjadi keliruan dalam perencanaan laporan sesuai pedoman yang ditata, dan kredibilitasnya menjadi meragukan. Maknanya SDM tak akan dapat memenuhi kebutuhannya baik kuantitas maupun kualitasnya jika tak kompeten

dalam menyusun laporan moneter. kajian menerangkan ada hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas LKPD, yakni kajian dilaksanakan Kansah, dkk (2023) dengan keterangan kompetensi SDM memberi pengaruh searah atas kualitas LKPD. Serupadengan kajian Mitjo, dkk (2022) kompetensi SDM meberi pengaruh substansial dengan kualitas laporan keuangan.

Bila diamati dari total volume APBN/D terdapat pertumbuhan yang dastis. Pemerintah pusat dan provinsi diwajibkan membuat dan memakai insentif dalam kerangka data untuk menumbuhkan kemampuan mengawasi dana daerah, dan meneruskan data keuangan daerah kepada pemerintah. Komitmen pemanfaatan inovasi data oleh otoritas publik dan penyelenggaraan negara diarahkan dalam PP No. 56 Tahun 2005. Kemampuan penyimpan data besarbesaran, meminimalkan kesalahan, dan mengurangi biaya pemerosan hanyalah beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi informasi. Keuntungan lainnya termasuk kecepatan penyelesaian transaksi dan pemerosan serta penyusunan laporan. Namun penerapan teknologi informasi akan memakan biaya besar jika tidak dimanfaatkan secara maksimal (Binawati, 2022). Terkait dengan peralatan dan program yang dipakai, kondisi SDM yang ada belum memiliki informasi yang memadai untuk menggunakan data mekanis, dan berbagai hambatan yang menjadi sumberdaya terbatas untuk melaksanakan data inovatif (Binawati, 2022). Pada observasi terhadap Bapak Christian Natanel Sendow sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran di PUTR, menerangkan “Pemanfatan teknologi informasi akuntansi atas kualitas laporan keuangan di Dinas PUTR belum dilakukan secara maksimal. Tercermin pada proses pembukuan dan pencatatan transaksi keuangan dilaksanakan manual dengan memakai buku khusus. Pendekatan manual ini berpotensi

menyebabkan kesalahan dan memakan waktu lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi tidak merata di seluruh organisasi. Beberapa bidang masih mengandalkan proses manual tanpa memanfaatkan alat bantu teknologi, sehingga efisiensi kerja menjadi terhambat. Penggunaan perangkat pribadi oleh sebagian pegawai juga menjadi fenomena, menciptakan tantangan terkait keamanan dan konsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan. Dampak dari proses manual dan kurangnya pemanfaatan teknologi mencakup risiko kesalahan dan ketidakakuratan dalam pencatatan keuangan, yang secara langsung memberi pengaruh kualitas laporan keuangan yang diselesaikan”

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan juga secara otomatis mengharuskan pejabat mengalihkan pekerjaannya dari yang manual ke yang terkomputerisasi. Hambatan atas pemanfaatan inovasi data antara lain kondisi peralatan, program yang dipakai, informasi terkini, kondisi SDM yang ada, dan cadangan yang terbatas. Instansi pemerintah mungkin tidak memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal karena kendala tersebut (Binawati, 2022). Terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi telah dibuktikan dalam kajian Ridzal, dkk (2022) pemanfaatan teknologi informasi memberi pengaruh atas kualitas LKPD. Kajian dilaksanakan oleh Sinulingga, dkk (2022) menerangkan pemanfaatan teknologi informasi memberi pengaruh searah atas kualitas LKPD.

Permasalahan administrasi keuangan daerah juga tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM. SAKD dimaknai pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai prinsip akuntan yang berlaku umum, serta proses pencatatan, pengklasifikasian, interpretasi, dan

pengikhtisaran transaksi atau peristiwa keuangan, tertuang dalam kemendagri Nomor 29 Tahun 2002, Pasal 70 Ayat 1 (Sinulingga dkk., 2022). Observasi pada PUTR dengan partisipasi Bapak Christian Natanel Sendow menyatakan bahwa, “Perubahan dalam sistem informasi akuntansi yang digunakan, yaitu dari SIMD beralih ke SIPD sebagai respons terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Namun, permasalahan terkait penggunaan SIPD dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas PUTR diantaranya terkait adaptasi terhadap perubahan regulasi pemerintah selain itu permasalahan lainnya ialah keterlambatan penginputan data proyek dalam sistem SIPD. Hal ini memberikan indikasi bahwa sistem tersebut mungkin tidak optimal dalam mendukung efisiensi operasional. Fenomena keterlambatan input proyek menciptakan situasi dimana pegawai terpaksa melakukan input di luar jam kerja atau bahkan pada malam hari. Hal ini bukan hanya menunjukkan ketidakefisienan sistem, tetapi juga dapat berdampak pada kesejahteraan pegawai, karena mereka terpaksa bekerja di luar waktu kerja reguler. Penggunaan sistem informasi akuntansi yang tak optimal dapat merugikan kualitas laporan keuangan. Keterlambatan input data proyek dapat menyebabkan informasi keuangan yang tak akurat dan tepat waktu. Kualitas laporan keuangan sangat tergantung pada keakuratan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Jika proses input terlambat atau terganggu, hal ini dapat merugikan integritas dan keandalan informasi keuangan yang didapati.

Pengaplikasian SAP tepat dan mendalam SAKD oleh pengelola keuangan akan menjamin kualitasnya. SAP mempunyai ketegantungan dengan kualitas LKPD. Laporan keuangan daerah dianggap berkualitas jika mendapat pendapat BPK setiap tahunnya. Dengan asumsi BPK memberikan WTP atas LKPD, maknanya laporan

pemerintah provinsi diperkenalkan dan diungkapkan dengan baik dan berkualitas (Umam, 2022). SAKD memberi pengaruh searah atas LKPD dalam kajian Sinulingga, dkk (2022) dan Nurrohmah (2023).

Penelitian ini mencoba menggali dan menganalisis hubungan antar variable – variable utama yang diyakini memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, terutama dalam konteks SKPD. Fenomena yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah Terjadinya keterlambatan saat merealisasikan keuangan di sistem yang disebabkan oleh lambatnya tender proyek kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR yang dipengaruhi oleh kualitas SDM diatarbelakangi pendidikan yang tidak sesuai spesifikasi dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dimana adanya perubahan sistem yang justru menimbulkan kendala bagi pegawai pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng bermasalah, Adanya kendala dalam pengoprasian sistem SIPD karena lemahnya jaringan serta kurangnya sosialisasi kepada seluruh pegawai Dinas dalam penggunaan aplikasi SIPD dan Perubahan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang sebelumnya SIMD dan beralih ke SIPD menyebabkan keterlambatan dalam melakukan pengimputan dan transaksi yang dilakukan pada sistem sebelumnya.

Secara teoritis yang mendasari kajian ini ialah bagian dari *Stewardship Teori* dan *Agency Teori*. Stewardship memfilosofikan keadan bila administrasi yang terburu untuk meraih manfaat individual, namun justru untuk kepentingan bersama Donaldson dan Davis (1991). Teori stewardship ialah gambaran pihak manajemen yang termotivasi untuk mewujudkan tujuan oraganisasi daripada mengutamakan kepentingannya sendiri (Indrayani & Widiastuti, 2020). Teori ini dapat diimplementasikan dalam bidang akuntansi instansi sektor publik misalnya instansi

pemerintahan dan instansi non profit, dimana instansi-instansi tersebut dipersiapkan guna memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak stewards dan principal. Dalam pengelolaan sektor publik, pemerintah harus mampu memberikan pelayanan selaku steward untuk kepentingan principals. Dalam hal ini, instansi pemerintahan selaku steward atau pelayan bukan agent. Teori ini memuat pemerintah daerah sebagai organisasi yang dapat diandalkan, mewajibkan aspirasi public, menawarkan jenis bantuan kepada daerah, dan menjadi sponsor dalam penatausahaan aset-aset publik, dengan demikian seharusnya lembaga harus terbuka dalam penatausahaan dan pemanfaatan cadangan APBN. Keterkaitan hipotesa terletak pada perincian moneter, yang otoritas publik memberi peran sebagai pihak yang bertanggung dengan tatanan sehingga wajib mengungkap seluruh data yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mempunyai premi sebagai pihak data yang bertindak sebagai administrator untuk mengevaluasi tanggungjawab dan memutus strategi sosial, politik dan moneter, langsung atau tak langsung yang dijabarkan melalui delegasi mereka. Hubungan keagenan dapat yakni pemerintah dengan pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi dari laporan keuangan.

Merujuk pada kajian dilaksanakan Intan Novrika Lestari pada tahun 2023. Research gap dari kajian ini terletak pada kebaruan yang berbeda, yaitu penggunaan variable sistem akuntansi keuangan daerah sebagai elemen krusial dalam analisisnya. Selain itu, kajian ini mempunyai ciri khas tersendiri dalam pemilihan objek yakni kualitas laporan keuangan pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Dengan menggabungkan variable kompetensi SDM, pemanfaatan TIA dan penerapan SAKD, kajian dinantikan memberi wawasan yang mendalam dan relevan terkait dengan faktor pemberi pengaruh kualitas laporan keuangan tersebut. Sebab

menolong pengembangn pemahaman yang lebih baik cara meningkatkan kualias laporan keuangan SKPD dan mendorong pertumbuhan SDM dan pertumbuhan laporan keuangan pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng.

Faktor tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi untuk menghasilkan kualitas LKPD yang lebih baik khususnya pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Berdasar pada uraian serta fenomena tersebut maka pengkaji tertarik untuk melaksanakan kajian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi (TIA), dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) atas Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar landasan yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui beberapa permasalahan yakni:

1. Terjadinya keterlambatan saat merealisasikan keuangan di sistem yang disebabkan oleh lambatnya tender proyek kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR yang dipengaruhi oleh kualitas SDM dimana latar belakang pendidikan yang tidak sesuai spesifikasi dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dimana adanya perubahan sistem yang justru menimbulkan kendala bagi pegawai pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng bermasalah.
2. Adanya kendala dalam pengoprasian sistem SIPD karena lemahnya jaringan serta kurangnya sosialisasi kepada seluruh pegawai Dinas dalam penggunaan aplikasi SIPD.

- 3 Perubahan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang sebelumnya SIMD dan beralih ke SIPD menyebabkan keterlambatan dalam melakukan pengimputan dan transaksi yang dilakukan pada sistem sebelumnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Pebatasan permasalahan dimaksudkan memfokuskan kajian. Sehingga penulis hanya memfokuskan pada Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan TIA dan Penerapan SAKD atas Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar landasan yang dipahami, maka persoalan yang akan diperiksa tersebut dibentuk menjadi pertanyaan berikut:

- 1 Apakah kompetensi SDM memberi pengaruh atas kualitas laporan keuangan yang ada pada Dinas PUTR ?
- 2 Apakah pemanfaatan TIA memberi pengaruh atas kualitas laporan keuangan yang ada pada Dinas PUTR ?
- 3 Apakah penerapan SAKD memberi pengaruh atas kualitas laporan keuangan yang ada pada Dinas PUTR ?
- 4 Apakah kompetensi SDM, pemanfaatan TIA dan penerapan SAKD memberi pengaruh bersamaan atas kualitas laporan keuangan pada Dinas PUTR ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasar landasan, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dijelaskan, pengkaji dapat membuat maksud kajian yakni:

- 1 Untuk menganalisa pengaruh kompetensi SDM atas kualitas laporan keuangan pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng.
- 2 Untuk menganalisa pengaruh pemanfaatan TIA atas kualitas laporan keuangan pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng.
- 3 Untuk menganalisa pengaruh SAKD atas kualitas laporan keuangan pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng
- 4 Untuk menganalisa pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan TIA dan penerapan SAKD atas kualitas laporan keuangan pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berikut ini ialah manfaat yang dinantikan dari kajian ini::

- 1 Manfaat Teoritis
Luaran kajian dinantikan memberi pemahaman tentang ilmu yang terkait dengan SDM, teknologi TIA, dan SAKD atas kualitas laporan keuangan.
- 2 Manfaat Praktis
 - a Bagi Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Buleleng
Luaran dinantikan membantu menentukan kebijakan melalui informasi yang didapat dalam kajian ini, khususnya memuat kompetensi SDM, pemanfaatan TIA dan penerapan SAKD atas kualitas laporan keuangan.

b Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Kajian dinantikan menambah sumber kajian bagi pengkaji selanjutnya terkhususnya memuat kompetensi SDM, pemanfaatan TIA dan penerapan SAKD atas kualitas laporan keuangan.

c Bagi peneliti selanjutnya

luaran dinantikan menjadi sumber tambahan bagi pengkaji selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan sejenis untuk mengembangkan kajian ini sehingga membentuk luaran yang terbaik

